

Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Dalam Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara

Wahyu Ramadhani

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : wahyuramadhani76@gmail.com

Abstrak

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Melakukan Analisa Ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada desa yang menjadi tujuan wisata yang berada di pinggir Danau Toba dan Melakukan Analisa efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Desa pada Desa wisata yang berada di pinggir Danau Toba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data cross section dengan objek penelitian 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba dan juga data runtut waktu (time series). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji analisis faktor. Berdasarkan hasil uji analisis faktor, variabel Komponen dana desa sesuai SOP dan variabel Transparansi & Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba, sedangkan variabel Output Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

Kata Kunci : Dana Desa, Kebijakan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, PDRB

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Akibat adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro, 2011).

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segalapotensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak dulu, desa identik dengan daerah pinggiran, persawahan, kurangnya fasilitas dan lainnya. Namun hal ini mungkin saja sudah berubah, karena adanya pembangunan dengan prioritas wilayah desa. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada salah satu strategi pembangunan nasional, tepatnya pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang menekankan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.

Pembangunan daerah dan desa merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Pembangunan desa atau daerah kini sudah jelas telah menjadi prioritas utama pemerintah. Pembangunan kini diratakan ke seluruh Indonesia bahkan pemerintahan saat ini tengah mengutamakan pembangunan daerah pinggiran ketimbang pembangunan Ibu Kota agar elemen masyarakat terkena dampak pembangunan.

Adanya prioritas pembangunan di wilayah desa ini dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah mengurangi terjadinya migrasi penduduk desa ke wilayah kota. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa, baik itu Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dan lainnya. Lebih jauh lagi, sarana dan prasarana ekonomi perlu dibangun di desa. Adanya sarana dan prasarana ekonomi di desa ini akan memberikan peluang usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Jika di desa-desa sudah banyak terbuka lapangan usaha, seharusnya migrasi penduduk desa ke kota akan berkurang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPS, 2015).

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada desa. Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 persen.

Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, dalam perkembangannya. Sehingga mencapai menjadi desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. (Sriyati,dkk 2019).

Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sertamemperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undangundang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Sriyati ,dkk 2019).

Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata.Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pariwisata menjadi penting sebagai penyumbang devisa andalan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Peran sektor pariwisata makin penting dalam Perekonomian Sumatera Utara, baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam rancangan pembangunan nasional, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pengembangan pariwisata harus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata di Sumatera Utara sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Salah satu potensi terbesar sektor pariwisata Sumatera Utara yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia yang terletak di provinsi Sumatra Utara, berjarak 176 km kearah barat kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia dan juga merupakan sebuah kaldera volcano-tektunik (kawah gunung api raksasa) kuartir terbesar di dunia. Sebagai danau volcano tektunik terbesar didunia, Danau Toba memiliki Panjang 100 kilometer (62 mil), lebar 30 kilometer (mil) dengan ketinggian 905 meter diatas permukaan laut(dpl) dan kedalaman danau yang terdalam 505 meter.(Wikipedia)

Bak magnet yang terus-menerus menyedot perhatian dunia, Danau Toba bukan hanya menarik perhatian para turis mancanegara. Para pakar bidang pergunungapian pun tak bosan-bosannya bolak-balik ke kawasan itu demi menguak misteri yang masih tersembunyi. Kekuatan magnet Danau Toba kian nyata ketika Dewan Eksekutif UNESCO dalam sidangnya yang ke-209 di Paris, Prancis, Selasa (2/7/2020), menetapkan kaldera Toba sebagai Global Geopark atau menjadi warisan dunia yang harus dijaga dengan baik.

UNESCO menilai, kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks inilah, negara anggota UNESCO mendukung kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Penetapan kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark memberikan kesempatan dan sekaligus juga tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat.

Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, memberikan kesempatan dan sekaligus tanggung jawab bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat setempat. Penetapan ini dapat mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Melalui pengembangan geo-pariwisata yang berkelanjutan, terbuka peluang bagi masyarakat setempat untuk promosi budaya, produk lokal serta penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan adanya pengakuan dan perhatian dunia terhadap Kaldera Toba, pemerintah dan masyarakat setempat berkewajiban untuk meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan dari Kawasan Kaldera Toba. Kaldera Toba, Provinsi Sumatera Utara terbentuk dari ledakan super volkano 74.000 tahun lalu. Dasar Kaldera tersebut dipenuhi dengan air dan menjadi danau terbesar di Indonesia dan menjadi wisata nomor tiga di Indonesia setelah Bali dan Mandalika.

Danau Toba merupakan salah satu dari 88 yang termasuk ke dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti lingkungan hidup, atau pertahanan dan keamanan. Pengembangan Desa wisata di Kawasan Kaldera Toba dinilai bisa memanfaatkan Dana Desa. Apalagi anggaran yang diterima desa terus bertambah setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kawasan Kaldera Toba, Pemberian Dana desa diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan desa, meningkatkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan perekonomian daerah terutama di Kawasan Kaldera Toba melalui pengembangan geo-pariwisata yang berkelanjutan dan dapat menjadikan masyarakat sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu "Kebijakan Dana Desa ; Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya (Kuncoro, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Data yang akan diteliti adalah 7 Kabupaten di Kawasan Wisata Kaldera Toba dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2018 sampai 2021 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, dan Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengelolaan Dana Desa pada 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba Sumatera Utara. Pada periode 2020 sampai 2021 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) www.kemenkeu.go.id, dan Kementerian Desa PDTT (Kemendesa) www.kemendesa.go.id. Waktu penelitian ini direncanakan selama 5 bulan yaitu Maret 2021 sampai Juli 2021.

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numeric, sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat yang dibedakan menjadi data interval dengan data rasio.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data orisinal (Kuncoro, 2013). Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dalam penelitian ini Populasinya yaitu Pemerintahan Desa yang berada pada desa wisata di pinggir Danau Toba. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah NonProbability Sampling, karena tidak ada upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel dengan desain sampel semacam ini, masalah representasi (keterwakilan) tidak dipersoalkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website-website resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), yang berupa data silang tempat (cross section) dengan objek penelitian 7 Kabupaten di Kawasan Kaldera Toba dan juga data runtut waktu (time series). Kemudian penelitian kepustakaan (library research) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Perekonomian Daerah. Melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, analisa faktor.

3. HASIL PENELITIAN

1. Convergent Validity

Convergent validity merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui loading factor

pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai convergent validity layak/terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat nilai rule of thumb, dimana nilai loading factor lebih besar dari 0,60 – 0,70, namun dapat juga diterima rentang loading factor lebih besar dari 0,50 – 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada convergent validity pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Convergent Validity Pada Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP berjumlah 3 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.1 Convergent Validity Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
KD1	-0,370	0,70	Tidak Memenuhi
KD2	0,809	0,70	Memenuhi
KD3	0,764	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

2. Convergent Validity Pada Transparansi & Akuntabilitas

Indikator konstruk pada variabel Transparansi & Akuntabilitas berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.2 Convergent Validity Tranparansi & Akuntabilitas

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
TA1	0,884	0,70	Memenuhi
TA2	-0,557	0,70	Tidak Memenuhi
TA3	0,377	0,70	Tidak Memenuhi
TA4	0,400	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

3. Convergent Validity Pada Output Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Output Dana Desa berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.3 Convergent Validity Output Dana Desa

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
ODD1	-0,282	0,70	Tidak Memenuhi
ODD2	0,147	0,70	Tidak Memenuhi
ODD3	0,273	0,70	Tidak Memenuhi
ODD4	0,853	0,70	Memenuhi
ODD5	0,744	0,70	Memenuhi
ODD6	0,387	0,70	Tidak Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

4. Convergent Validity Pada Pengelolaan Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Pengelolaan Dana Desa berjumlah 1 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.4 Convergent Validity Pengelolaan Dana Desa

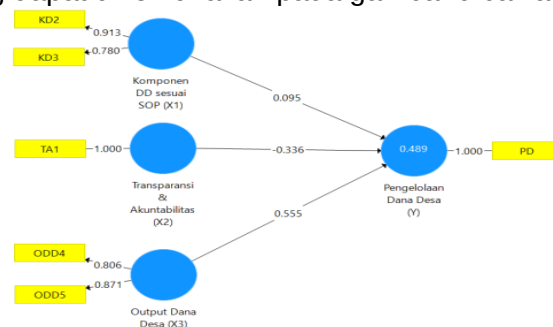
Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
PD	1,000	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Berdasarkan tabel convergent validity indikator konstruk pada masing-masing variabel, maka dapat di kemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk KD1. Variabel Tranparansi & Akuntabilitas yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk TA2, TA3, dan TA4. Variabel Output Dana Desa yang tidak memenuhi nilai loading factor adalah indikator konstruk ODD1, ODD2, ODD3, dan ODD6. Variabel Pengelolaan Dana Desa seluruh indikator konstruk memenuhi nilai loading factor.

Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun

hasil analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang dapat dikemukakan pada gambar dibawah ini :



Gambar.1 Second Outer Loading

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini :

1. Convergent Validity Pada Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator konstruk pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang, maka berjumlah 2 (dua) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.5 Convergent Validity Komponen Dana Desa Sesuai SOP

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
KD2	0,913	0,70	Memenuhi
KD3	0,780	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

2. Convergent Validity Pada Transparansi & Akuntabilitas

Indikator konstruk pada variabel Transparansi & Akuntabilitas setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang, maka berjumlah 1 (satu) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.6 Convergent Validity Tranparansi & Akuntabilitas

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
TA1	1,000	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

3. Convergent Validity Pada Output Dana Desa

Indikator konstruk pada variabel Output Dana Desa setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang, maka berjumlah (dua) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel dibawah ini :

Tabel.7 Convergent Validity Output Dana Desa

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Keterangan
ODD4	0,806	0,70	Memenuhi
ODD5	0,871	0,70	Memenuhi

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

2. Discriminante Validity

Dalam analisis discriminant validity dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading pada masing-masing variabel. Dalam pengujian discriminant validity menggunakan Average Variance Extracted (AVE). adapun parameter cross loading dalam menilai nilai average variance extracted untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($> 0,50$) (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Hasil analisis discriminant validity dapat dikemukakan pada table di bawah ini:

Tabel.8 Discriminante Validity Pada Avarage Extracted (AVE)

Variabel	Nilai
Komponen Dana Desa Sesuai SOP	0.849
Transparansi & Akuntabilitas	1.000
Output Dana Desa	0.839
Pengelolaan Dana Desa	1.000

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel memperlihatkan bahwa nilai average variance extracted pada masing-masing variable tidak memenuhi kriteria dalam discriminant validity, hal ini disebabkan nilai average variance extracted pada masing-masing variabel $< 0,50$, maka untuk memenuhi persyaratan dalam discriminant validity dimana nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka indikator-indikator konstruk yang memiliki nilai loading factor paling rendah/kecil dikeluarkan dalam model pengukuran. Berdasarkan hasil analisis dimana nilai loading factor pada indikator konstruk paling rendah pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP adalah KD3, dan variabel Output Dana Desa adalah ODD4.

3. Composite Reliability

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Adapun dalam melakukan penilaian terhadap composite reliability melalui rule of thumb, dimana nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Pengujian reliabilitas pada setiap konstruk juga dapat dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha, ketentuan dari penilaian dilakukan melalui rule of thumb, dimana nilai Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,70 ($> 0,70$). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel.9 Composite Reliability

Variabel	Nilai	Keterangan
Komponen Dana Desa sesuai SOP	0.837	Reliabel
Transparansi & Akuntabilitas	1.000	Reliabel
Output Dana Desa	0.826	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	1.000	Reliabel

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel 4.24 memperlihatkan bahwa nilai composite reliability pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP, Transparansi & Akuntabilitas, Output Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa, masing-masing sebesar 0.837 ; 1.000 ; 0.826 ; dan 1.000. Seluruh nilai reliability construct $> 0,70$. Maka dalam hal ini keberadaan variabel memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square. Dimana nantinya dapat diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent (perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi) terhadap variable dependent (penyerapan anggaran). Hasil analisis R-Square dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel.10 R-Square

	R-Square
Pengelolaan Dana Desa	0.489

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel memperlihatkan nilai R-Square pada variable penyerapan anggaran sebesar 0,489. Maka dapat dijelaskan bahwa variance pada variabel Komponen Dana Desa sesuai SOP, Transparansi & Akuntabilitas, dan Output Dana Desa mampu menjelaskan variabel Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,489. Berdasarkan pendapat Chin (Ghozali dan Latan, 2015) mengemukakan kriteria R-Square jika Rule of Thumb sebesar 0,67 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,33 model penelitian dalam kategori moderat, 0,19 model

penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai R-Square sebesar 0,489. Maka model penelitian dalam kategori moderat.

5. Pengujian Hipotesis

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel.11 Uji Hipotesis

	Original Sample	T Statistic	P Values	Keputusan
X1 → Y	0.120	0.493	0.622	H0 diterima
X2 → Y	-0.311	1.078	0.281	H0 diterima
X3 → Y	0.580	2.152	0.032	H0 ditolak

Sumber : Data Hasil Pengolahan PLS

Tabel dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t_{\text{statistic}} > t_{\text{tabel}}$) pada taraf signifikansi 5 % (t_{tabel} dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 20 orang) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika $< 0,05$, dimana kesimpulannya tolak H0, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya.

4. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba (X1 → Y)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 0,493 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t_{\text{statistic}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,493 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,622 > 0,05$. Ketentuannya terima H0, maka disimpulkan bahwa Komponen Dana Desa sesuai SOP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

2. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba (X2 → Y)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Transparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 1,078 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t_{\text{statistic}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,078 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,281 > 0,05$. Ketentuannya terima H0, maka disimpulkan bahwa Transparansi & Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

3. Pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba (X3 → Y)

Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba berdasarkan tabel 4.21 memperlihatkan bahwa diperoleh nilai t statistic sebesar 2,152 sementara nilai t tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh sebesar 2,086 berdasarkan jumlah sampel sebesar 20 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa $t_{\text{statistic}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,152 > 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,032 < 0,05$. Ketentuannya tolak H0, maka disimpulkan bahwa

Output Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Komponen Dana Desa sesuai SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($0,493 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,622 > 0,05$. Maka Ketentuannya terima H_0 , bahwa Komponen Dana Desa sesuai SOP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

2. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Tranparansi & Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} < t \text{ tabel}$ ($1,078 < 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,281 > 0,05$. Maka Ketentuannya terima H_0 , bahwa Transparansi & Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

3. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan pengaruh Output Dana Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$ ($2,152 > 2,086$), untuk menguatkan hasil analisis ini dapat juga menggunakan P Value, dengan ketentuan $p < 0,05$, berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan nilai $0,032 < 0,05$. Maka Ketentuannya tolak H_0 , bahwa Output Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.

4. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor kontruksi masih mendominasi penyumbang PDRB terbesar di Kawasan Kaldera Toba.

5. Sektor pariwisata belum menjadi penyumbang PDRB di Kawasan Kaldera Toba.

6. Garis kemiskinan di Kawasan Kaldera Toba masih berada dibawah garis kemiskinan Nasional dan dibawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara.

7. IPM di Kawasan Kaldera Toba yang berstatus “sedang” masih berada dibawah IPM provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang berstatus “tinggi”.

6. REFERENSI

- AFRIANI, S. ANALISIS PARTISIPASI TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI KABUPATEN SIMALUNGUN SKRIPSI.
- Andriany, D., HASIBUAN, L. S., & Rahayu, S. E. (2018). Pengembangan model pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Medan untuk memperbaiki taraf hidup. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Ardila, I., & Febriaty, H. F. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABOR PRACTICES AND DECENT WORK DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 17(2).
- Arsyad, L. (2005). pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. yogyakarta: BPFE-UGM.
- bdillah, M. F. (2017). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Deli Serdang. 28, 29, 30.
- Azwardi. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. 20, 21, 22.
- Badan Pusat Statistik. indeks pembangunan desa 2018. Retrieved from www.bps.go.id: <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2020). Retrieved from www.bps.sumut.go.id.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. (2020). Retrieved from www.simalungunkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir. (2020). Retrieved from www.samosirkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. (2020). Retrieved from www.tobasakab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi. (2020). Retrieved from www.dairikab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. (2020). Retrieved from www.karokab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. (2020). Retrieved from www.tapanuliutarakab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. (2020). Retrieved from www.humbanghasundutankab.bps.go.id.
- buku pintar dana desa. (2017). Jakarta: Kementerian keuangan republik indonesia.
- Dana Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
- Djojohadikusumo, S. (1994). perkembangan pemikiran ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. jakarta: Pustaka LP3ES.
- DKK, S. (2019). Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. fahrurozi, m. (n.d.).
- Febriaty, H., & Nurwani, N. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Gustiadi, R. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Doctoral dissertation).
- Handra. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan. 14, 15, 16, 17.
- Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Sinambela, E. (2018). STRATEGI KEBIJAKAN BUMDES: BOTTOM-UP of ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL (STUDI KASUS KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA) Tahun 1 dari Rencana 2 Tahun. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- HUDDIN, H. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Wira Sukses Sejati Medan.
- Husain, U. (2003). Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jhingan, M. (2000). ekonomi pembangunan dan perencanaan daerah. jakarta: PT Rajawali Pers.
- Kementerian Desa PDTT. Dana Desa. <http://www.kemendesa.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rincian Dana Desa APBN 2019. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rincian Dana Desa APBN 2020. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rincian Dana Desa APBN 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Kuncoro, M. (2000). ekonomi pembangunan : teori, masalah, kebijakan (edisi pertama). yogyakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). otonomi dan pembangunan daerah. jakarta: Erlangga. Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
- Latan, I. G. (n.d.). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Otonomi Desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 "Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025".
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . Economics Development Analysis Journal , 108.
- Mankiw, G. N. (2007). macroeconomics. jakarta: Erlangga.
- MEDAN, P. P. P. K., & SIAGIAN, D. I. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN.
- MEDAN, T. W. PENGARUH SIKAP KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.(PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA.
- Munthe, R. R. (2019). Analisis Potensi Pensiun Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia (Doctoral dissertation).
- Peggy, R. A. (1993). keuangan negara dalam teori dan praktek (edisi kelima). jakarta: erlangga.

- Raharjo, a. (2006). pembangunan pedesaan dan perkotaan. yogyakarta: Graha ilmu Yogyakarta.
- Rahayu, A. S. (2014). pengantar kebijakan fiskal. jakarta: bumi aksara. Rahayu, S. E., & Harahap, M. (2019). Model Peningkatan Daya Saing Petani Dengan Pendekatan Koperasi Agribisnis di Kota Medan. JASc (Journal of Agribusiness Sciences), 2(1), 18-25.
- Rambe, M. F., & Hariani, P. (2018). IMPLIKASI FUNGSI PRODUKSI COBB-DOUGLAS PADA USAHA MIKRO KECIL (UMK) MAKANAN SIAP SAJI DI KOTA MEDAN TAHUN 2015. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- RS, P. H. (2018). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia ; Peningkatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Pada Provinsi Se-Indonesia.
- RS, P. H. (n.d.). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
- Rusli, B. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan.
- Sarani, I. (2019). Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Gayo Lues Pasca Kebijakan Otonomi Khusus (Doctoral dissertation).
- Smith, A. (n.d.). Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Sugiarto, T. J. (1998). Lisrel. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sujianto, A. E. (2009). Aplikasi Statistik dengan Spss 16.0. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Smith, P. M. (2011). pembangunan ekonomi jilid 1 (edisi kesebelas). jakarta: Erlangga.
- Sukanto, A. (2014). efektivitas dana desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan. ekonomi pembangunan, 29-41.
- Sukirno, S (2010). makroekonomi. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tupti, Z., Hariani, P., & Pohan, M. (2018). PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA: PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Tupti, Z., Hariani, P., & Pohan, M. (2018). PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA: PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Zainuddin, M. (2018). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).